



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dan menelaah hasil wawancara, mengamati dan mempelajari dokumen pada masing-masing objek penelitian, tim pendiri unit sekolah baru SMK di propinsi Jawa Barat dan propinsi Banten dapat mewujudkan pembangunan fisik gedung tanpa terkendala oleh faktor geografis, jarak, bentuk, ukuran, lokasi. Dapat melaksanakan pekerjaan dengan pola swakelola dengan harga standar 75 % dari harga standar dinas PU di wilayahnya.

1. Biaya pekerjaan di suatu wilayah ditentukan oleh faktor sumber daya, lokasi dan transportasi, beberapa komponen biaya yang terangkum dalam harga standar terdiri dari biaya perencanaan pengawasan; biaya fisik dan biaya pengelolaan.

Pekerjaan yang dilaksanakan dengan pola swakelola prinsipnya tidak dimungkinkan adanya penambahan biaya untuk volume lebih, pekerjaan tambah, tidak diperkenankan terjadi pengurangan volume pekerjaan, tim pendiri melaksanakan sesuai *Memorandum of understanding (Mou)* yang telah disepakati dengan perpedoman pada rencana penggunaan dana (RPD).



Pembiayaan sumber dana dari pusat APBN dapat tercapai target sesuai *Memorandum of understanding (Mou)*, dilaksanakan sesuai batasan waktu pelaksanaan 150 hari kalender, sedangkan sumber dana dari APBD sebagai *sharing* tidak dapat diwujudkan dalam tahun anggarannya, akibat dana *sharing* tidak mencukupi atau akibat pengalihan digunakan pembenahan infrastruktur seperti penimbunan dan pematangan lahan.

Pelaksanaan dana APBD di 6 lokasi objek penelitian dilaksanakan oleh pihak ketiga/kontraktor, walau di *Muo* sudah disepakati pola pelaksanaan dengan pola swakelola.

Tidak tercapainya volume dan realisasi dana yang bersumber dari APBD dimungkinkan sebagai berikut :

- a. Pola yang dilaksanakan kontraktual, dibutuhkan proses lelang ada proses waktu.
 - b. Kenyataan hasil yang dicapai kurang maksimal
 - c. Dipengaruhi oleh eskalasi harga, peninjauan kembali anggaran
 - d. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah dan kurang
 - e. Realisasi dana APBD menunggu pembahasan dan persetujuan DPRD
2. Penetapan lokasi unit sekolah baru SMK hasil verifikasi membawa pengaruh persepsi suasana baru bagi rencana pengembangan wilayah, pengaruh



terhadap percepatan pengembangan wilayah dan prospek keberadaan SMK itu sendiri.

Faktor geografis pendirian unit sekolah baru SMK yang dipengaruhi oleh perbedaan dan keberadaan terhadap jarak, bentuk lahan, ukuran lahan, serta lokasi dimana berada, tidak menjadi masalah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pendirian USB SMK. Tim pendiri akan mampu mewujudkan dengan memanfaatkan kekayaan sumber alam dengan tidak merusak lingkungan, membeli material yang ada di lingkungannya.

Program keahlian yang dibuka di unit sekolah baru SMK tidak mempengaruhi terhadap minat dan jumlah siswa pendaftar, didukung kebenaran data sebelumnya telah dilakukan survey, sosialisasi awal terhadap calon siswa SMP/Mts, sosialisasi kebutuhan program keahlian apa yang dibutuhkan di industri dan banyak diminati masyarakat.

3. Peran pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang dilakukan tim pendiri pada kegiatan pembangunan unit sekolah baru SMK di dua propinsi Jawa Barat dan propinsi Banten, baru sampai tahapan kedua dan ketiga dari empat tahap yang paling tinggi yaitu : tahap kedua aspek afektif tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian; tahap ketiga aspek kognitif menguasai pengetahuan dasar; tahapan ketiga aspek psikomotorik mengembangkan ketrampilan dasar; tahap kedua aspek konatif bersedia terlibat dalam pembangunan.



Pemerintah pusat telah meyakini kebijakan yang tepat dimana peluang memberi daya bagi masyarakatnya agar tercipta tahapan kemandirian dalam melaksanakan suatu proses swakelola membangun gedung yang melibatkan peran pemberdayaan dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pendirian unit sekolah baru SMK masih terkendala oleh tahapan pemahaman dan kemampuan masyarakat yang dibantunya. Diperlukan sosialisasi, pelatihan, pemberian motivasi agar tercipta tahap kemandirian dengan anggapan bahwa potensi dimasyarakat kita sangat besar, memiliki kekuatan yang belum digali, dan dapat dikembangkan.

Bagaimana harapan sesungguhnya pemerintah dengan keterbatasan dana APBN dapat membangun pendirian unit sekolah baru secara maksimal, efektif dan efisien mengingat pola pelaksanaan swakelola merupakan pola pemberian bantuan dianggap tepat sampai saat ini. Akan tetapi sumber dana APBD masih enggan dilaksanakan dengan pola swakelola karena banyak pertimbangan seperti pengusaha jasa konstruksi di daerah akan menganggur jika tidak ada pekerjaan fisik, proyek-proyek daerah terbatas jumlahnya, sehingga pola swakelola yang dilaksanakan oleh tim pendiri dianggap tidak memberi kesempatan kepada mereka.

Bayaran upah kerja dan pembelian material dari masyarakat sekitar menumbuhkan ekonomi masyarakatnya selama proses pembangunan berlangsung dan harapan kedepan terus berlanjut berkat keberadaan SMK



menjadi daya dorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan bertambahnya penduduk pendatang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, pendirian unit sekolah baru SMK yang mengacu ke harga standar swakelola 75 % dari harga standar PU dapat dilaksanakan tercapainya volume sesuai kesepakatan rencana penggunaan dana di *Mou*, namun ketercapaian volume menjadi tidak berarti apabila mengabaikan aspek kekuatan konstruksi sehingga menjadi sama-sama penting untuk diperhatikan. Letak geografis negara kita ada di wilayah lempengan bencana alam gempa bumi, kekhawatiran akan timbulnya bencana gempa bumi dan bencana lainnya menjadi isu nasional dan internasional tentang keamanan bangunan sekolah. Ketahanan bangunan sekolah terhadap pengaruh gempa harus menjadi prioritas, ketercapaian target volume pendirian unit sekolah baru SMK merupakan bagian dari rencana perluasan akses SMK tetapi tidak harus mengesampingkan aspek keamanan dimana siswa menempati ruangan selama proses kegiatan belajar berlangsung.

1. Selama proses pembangunan pendirian USB SMK berlangsung aktifitas di lapangan dengan berbagai fungsi peran, ketua tim pendiri yang merangkap jabatan sebagai kepala sekolah akan berbeda menjalankan fungsinya bila hanya sebagai ketua tim pendiri saja. Banyak kejadian yang tidak diketahui



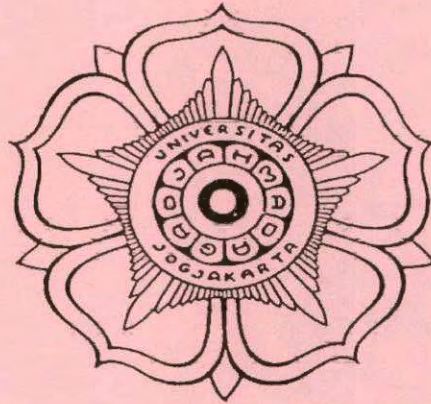
- selama proses pekerjaan berlangsung, ketua tim mengandalkan jalannya pelaksanaan kepada tim perencana dan pengawas ataupun kepada ketua pelaksana dan pekerja, karena munculnya masalah seperti keputusan memilih bahan, lemahnya konstruksi dan kejadian ambruknya konstruksi atap pada pendirian unit sekolah baru SMK di tempat lain harus menjadi perhatian akibat peran tidak dijalankan sesuai fungsinya.
2. Kualitas pekerjaan swakelola didapatkan hasil lebih baik dari pekerjaan oleh pihak ketiga, kualitas dimaksud bukan hanya kualitas bahan, kualitas finishing dan kualitas konstruksi, tetapi kualitas peran pemberdayaan dan partisipasi di masyarakat turut digerakan, masyarakat secara tidak disadari dilatih melalui pekerjaan yang dihadapi di pembangunan unit sekolah baru SMK. Harapannya untuk mencapai tingkat kemandirian di masyarakat berlanjut berimbas pada aktifitas kegiatan lainnya, sehingga terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan gedung USB SMK sangat tepat bila dilaksanakan dengan pola pelaksanaan swakelola yang melibatkan peran pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
 3. Persetujuan pedoman harga standar perlu dipertimbangkan berdasarkan letak geografis, namun harga standar 75 % harga swakelola bukan mencerminkan harga jadi, diperlukan rencana anggaran biaya pelaksanaan, uraian yang terinci berupa analisa harga satuan sehingga merupakan harga sebenarnya di wilayah tersebut.



Analisis Faktor-faktor Keberhasilan Pendirian Unit Sekolah Baru SMK di Jawa barat dan Banten
YUDI NORMAN , Drs. Wakhid Slamet Ciptono, MBA., MPM.

Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA



DAFTAR PUSTAKA